



PERUBAHAN RENJA

TAHUN 2025

KECAMATAN KARANGMALANG

 Jl. Dewi Sartika No.1 Karangmalang

 keckarangmalang@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN KARANGMALANG

Jl. Dewi Sartika Telp. 0271-891435 Puro, Karangmalang 57291
Website : <http://www.sragenkab.go.id> Email : karang_ml@sragenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KARANGMALANG
Nomor : 800 / 352 - 036 / 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KARANGMALANG
TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan meliputi pergeseran kegiatan antar perangkat daerah penambahan kegiatan dan perubahan lainnya, maka rencana kerja (Renja) Kecamatan Karangmalang Tahun 2025 perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Karangmalang tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Karangmalang
- mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- Peraturan Bupati Sragen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KARANGMALANG TAHUN 2025
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Karangmalang memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mengakomodasikan :
- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - Pergeseran kegiatan antar jenis belanja, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangmalang Tahun 2025 ini digunakan sebagai pedoman penyusunan kebijakan umum Perubahan APBD Tahun 2025 dan dokumen PPAS Perubahan APBD Tahun 2025
- KETIGA : Keputusan Camat Karangmalang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karangmalang
Tanggal : 25 Juli 2025

CAMAT KARANGMALANG



DANI WAHYU SETIAWAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangmalang Tahun 2025 dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangmalang Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerinth Daerah.

Bersama ini kami sampaikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini, belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa yang akan datang

Karangmalang, 24 Juli 2025

CAMAT KARANGMALANG



DANI WAHYU SETIAWAN, S.STP, MH
NIP. 19800131 199912 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vi

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 3

 1.3 Maksud dan Tujuan 5

 1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 7

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karangmalang Triwulan II Tahun 2025 7

 2.2 Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karangmalang 2025 8

 2.3 Permasalahan dan Penyelesaian masalah dalam Pelaksanaan hasil Renja Tahun 2025 9

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 23

 3.1 Tujuan dan Sasaran 23

 3.2 Rencana, Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2025

BAB V PENUTUP 35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	8
Tabel 3.1	:	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karangmalang Tahun 2025	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, sekaligus juga merupakan tahun peralihan dari kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2021-2026 ke Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada serentak 27 November 2024

Berdasarkan pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karangmalang Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka penyesuaian dengan adanya :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi target indikator pembangunan daerah, visi, tujuan dan sasaran, serta misi, arah kebijakan dan strategis dari bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pilkada serentak 27 November 2024. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- b. Penyesuaian Pendapatan dan efisiensi Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025, yaitu:

- 1) pergeseran rekening belanja dilaksanakan berkaitan dengan perubahan sasaran kegiatan serta pergeseran pelaksanaan kegiatan antar OPD berkaitan dengan penyesuaian tugas dan fungsi
 - 2) Efisiensi belanja dan atau pergeseran alokasi pada beberapa kegiatan dalam rangka penyesuaian dengan adanya perubahan alokasi Dana Transfer ke Daerah serta pemenuhan target sampai dengan akhir tahun 2025.
- c. Program/kegiatan strategis yang harus dilaksanakan segera dalam tahun anggaran 2025 yang belum terakomodasi dalam Penetapan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 terkait adanya perkembangan terbaru yang berkaitan dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan program/kegiatan dari Pemerintah Kabupaten atau pun Provinsi

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka diperlukan penyesuaian rencana kerja berupa Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karangmalang Tahun 2025. Dokumen perubahan rencana kerja tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dengan rencana kerja tahun anggaran 2025 sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada rencana kerja tahun 2025 yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya rencana kerja akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP), dan kemudian menjadi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) melalui penetapan APBD Perubahan Kabupaten Sragen Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Karangmalang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 19).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan rencana kerja (RENJA) Kecamatan Karangmalang Tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan kondisi terbaru, yang terkait dengan perubahan target kinerja, kebijakan anggaran, program dan kegiatan.

Sementara tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan kepastian, sinergi, dan konsistensi perencanaan program serta kegiatan internal Kecamatan Karangmalang demi memastikan bahwa rencana kerja selalu relevan dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan daerah
2. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya internal Kecamatan Karangmalang sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Karangmalang.
3. Mewujudkan sinergitas dan linieritas program dan kegiatan antar seksi dan sub unit kerja di lingkungan Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen.
4. Memastikan bahwa perubahan rencana kerja tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangmalang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum yang menjadi acuan, serta sistematika penulisan dokumen secara keseluruhan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini berisi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Karangmalang Tahun 2025 hingga Triwulan II. Evaluasi ini mencakup capaian kinerja, realisasi anggaran, hambatan yang dihadapi, serta langkah penyelesaian dalam menghadapi permasalahan

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGMALANG

Bab ini memuat uraian mengenai perubahan program dan kegiatan Kecamatan Karangmalang Tahun 2025

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi simpulan umum dari hasil evaluasi dan substansi perubahan Renja, serta harapan terhadap pelaksanaan Renja yang telah disesuaikan

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen Tahun 2025 bertujuan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi capaian kinerja, baik yang menyebabkan ketidaktercapaian, ketercapaian, maupun capaian yang melampaui target. Selain itu, evaluasi ini juga menjadi dasar dalam melihat dampak capaian terhadap arah pembangunan jangka menengah serta sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang lebih tepat dan responsif ke depan

2.1. *Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2025*

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan progres yang cukup baik. Rata-rata capaian seluruh program mencapai 59,13 %, mencerminkan kinerja pertengahan tahun yang solid dan menjadi landasan optimisme terhadap peningkatan capaian hingga akhir tahun anggaran

Beberapa kegiatan strategis telah menunjukkan performa maksimal dengan capaian 100%, seperti pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja SKPD, Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah kegiatan dengan capaian antara 0% hingga 30%, yang umumnya disebabkan oleh jadwal pelaksanaan yang tersebar sepanjang tahun serta belum masuknya tahapan realisasi.

Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas bidang dan optimalisasi manajemen pelaksanaan menjadi krusial untuk menjaga konsistensi capaian dan efisiensi pelaksanaan program ke depan. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja

dan pencapaian Renstra Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen sampai dengan tahun 2025 Triwulan II dapat ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Karangmalang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Indikator dan target kinerja Kecamatan Karangmalang yang mengacu pada sasaran RKPD
Sampai akhir Juni 2025

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II		Faktor-Fator Penyebab (Pendorong/Penghambat)
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A 1.	Predikat LKjIP Kecamatan Karangmalang		Hasil Review Inspektorat Daerah	Nilai	72 (BB)	-	-	-	[Penghambat] Nilai belum keluar karena masih proses evaluasi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	4.308.873.966	50,00	2.178.503.024	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen	4	5.920.000	2	3.402.800	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2.500.000	1	0	[Penghambat] Realisasi anggaran sedang berproses
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	3.420.000	2	3.402.800	[Pendorong] Koordinasi yang baik antar sub unit dalam pencapaian target kinerja
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Tercukupinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	3.582.431.066	50,00	1.814.647.707	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang	28	3.582.431.066	27	1.814.647.707	[Penghambat] Adanya mutasi pegawai
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase tercukupinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	5.000.000	0	0	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	28	5.000.000	0	0	[Penghambat] Dilaksanakan di triwulan III

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II		Faktor-Faktor Penyebab (Pendorong/Penghambat)
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tercukupinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	171.825.900	50,00	110.071.100	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	18.000.000	6	10.967.000	[Pendorong] Koordinasi lintas unit dan sub unit berjalan dengan baik
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	81.342.900	6	62.054.900	[Pendorong] Koordinasi lintas unit dan sub unit berjalan dengan baik
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	54.487.000	6	26.794.000	[Pendorong] Koordinasi lintas unit dan sub unit berjalan dengan baik
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	10.996.000	6	1.855.200	[Pendorong] Koordinasi lintas unit dan sub unit berjalan dengan baik
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	7.000.000	0	0	[Penghambat] Kebijakan efisiensi
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	16.870.000	50	8.400.000	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	16.870.000	1	8.400.000	[Penghambat] Sebagian mebel masih layak pakai, belum perlu pengadaan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	368.027.000	50	152.137.548	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2.400.000	6	588160	[Pendorong] Koordinasi lintas unit dan sub unit berjalan dengan baik
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	106.380.000	6	32.682.888	[Pendorong] Koordinasi lintas unit dan sub unit berjalan dengan baik

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II		Faktor-Faktor Penyebab (Pendorong/Penghambat)
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Laporan	30.346.000	6	22.882.000	[Pendorong] Koordinasi lintas unit dan sub unit berjalan dengan baik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	228.901.000	6	95.984.500	[Pendorong] Koordinasi lintas unit dan sub unit berjalan dengan baik
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (CPBMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	158.800.000	50	98.243.869	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	31	88.800.000	13	28.400.469	[Penghambat] Sebagian besar unit kendaraan jatuh tempo di triwulan IV
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Gedung	70.000.000	1	69.843.400	[Pendorong] Koordinasi lintas unit dan sub unit berjalan dengan baik
B	Meningkatnya Kinerja Kecamatan		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,5	Nilai				[Penghambat] Nilai belum keluar karena survei kepuasan masyarakat sedang berproses
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	100	%	791.089.800	50	338.680.800	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terkoordinir dengan Baik	100	%	131.689.800	50	54.410.800	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11	Laporan	10.000.000	11	9.960.800	[Pendorong] Koordinasi lintas unit dan sub unit berjalan dengan baik

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II		Faktor-Faktor Penyebab (Pendorong/Penghambat)
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Dokumen	121.689.800	6	44.450.000	[Pendorong] Koordinasi lintas unit dan sub unit berjalan dengan baik
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	%	659.400.000	50	284.270.000	
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	659.400.000	6	284.270.000	[Pendorong] Koordinasi lintas unit dan sub unit berjalan dengan baik
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	21.500.000	50	1.810.899.573	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Desa	100	%	21.500.000	50	5.928.000	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	21.500.000	6	5.928.000	[Pendorong] Koordinasi lintas unit dan sub unit berjalan dengan baik
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan	100	%	2.552.799.600	50	1.804.971.573	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40	Paket	2.300.418.000	23	1.631.191.573	[Pendorong] Koordinasi lintas unit dan sub unit berjalan dengan baik
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas	252.381.600	2	173.780.000	[Pendorong] Koordinasi lintas unit dan sub unit berjalan dengan baik
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penanganan Laporan Kejadian	100	%	22.000.000	50	10.500.000	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terkoordinir dengan Baik	100	%	22.000.000	50	10.500.000	

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II		Faktor-Faktor Penyebab (Pendorong/Penghambat)
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	22.000.000	6	10.500.000	[Pendorong] Koordinasi lintas unit dan sub unit berjalan dengan baik
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Terkoordinir dengan Baik	100	%	190.000.000	0	0	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terselenggara dengan Baik	100	%	190.000.000	0	0	
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional [Orang]	75	Orang	50.000.000	0	0	[Penghambat] Dilaksanakan di triwulan III
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	75	Orang	40.000.000	0	0	[Penghambat] Dilaksanakan di triwulan III
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40	Orang	100.000.000	0	0	[Penghambat] Dilaksanakan di triwulan III
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Jumlah Desa yang menyelesaikan RKP Desa dan APB Desa tepat Waktu	100	%	18.000.000	50	0	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Jumlah Desa yang Mendapatkan Fasilitasi, Rekomendasi, Pembinaan dan Pengawasan	100	%	18.000.000	50	0	

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II		Faktor-Fator Penyebab (Pendorong/Penghambat)
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3	Dokumen	1.000.000	2	0	[Penghambat] Realisasi anggaran sedang berproses
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dala, Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2	Dokumen	8.000.000	1	0	[Penghambat] Realisasi anggaran sedang berproses
Jumlah						7.904.196.366		4.338.583.397	

Dari segi anggaran, Triwulan II menunjukkan realisasi yang lebih baik dari Triwulan sebelumnya. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa penyerapan anggaran rata-rata hanya 45,47 %, artinya belum mencapai 50% meskipun sudah memasuki Triwulan II. Hal ini sejalan dengan pola umum penyerapan anggaran tahunan yang biasanya mengalami peningkatan pada triwulan akhir. Penjelasan lebih rinci disampaikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ditunjang melalui 7 kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah secara umum telah terlaksana sesuai target.

Dari pagu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 4.306.373.966, sampai dengan Triwulan II terealisasi sebesar Rp 2.374.647.756 atau sebesar 55,14%.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang ditunjang melalui 2 kegiatan yaitu Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan; secara umum telah terlaksana sesuai target.

Dari pagu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp 791.089.800, sampai dengan Triwulan II terealisasi sebesar Rp 337.390.800 atau sebesar 42,65%.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditunjang melalui 2 kegiatan yaitu Koordinasi Pemberdayaan Desa

dan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan secara umum telah terlaksana sesuai target.

Dari pagu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp 2.574.299.600, sampai dengan Triwulan II terealisasi sebesar Rp 1.890.902.579 atau sebesar 73,45%.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditunjang dengan 1 kegiatan yaitu Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum secara umum telah terlaksana sesuai target.

Dari pagu Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp 22.000.000, sampai dengan Triwulan II terealisasi sebesar Rp 10.500.000 atau sebesar 47,73%.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditunjang melalui 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah capaian kinerjanya masih 0, dikarenakan baru akan dilaksanakan di Triwulan III.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ditunjang melalui 1 kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa capaian kinerjanya masih 0, dikarenakan baru akan dilaksanakan di Triwulan III dan Triwulan IV.

Pada tahun 2025, Kecamatan Karangmalang melaksanakan 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 7.904.196.366,- (tujuh milyar sembilan ratus empat juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah). Sampai akhir triwulan II tahun 2025 ada sub kegiatan yang prosesnya sudah selesai 100%, yaitu :

1. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang sudah dilaksanakan mulai maret 2025 dan selesai pada awal bulan april 2025.

2. Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang merupakan pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan yang sudah dilaksanakan pada bulan Januari 2025 dan Februari 2025.
3. Sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional yang belum dilaksanakan dikarenakan mengalami efisiensi anggaran

Sementara untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan, capaian sampai akhir triwulan II adalah sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Dari anggaran Rp. 2.500.000,- belum terserap sama sekali, namun secara kinerja sudah dilaksanakan yaitu dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Karangmalang Tahun 2026
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dari anggaran Rp. 3.420.000,- telah terealisasi Rp. 3.402.800,- (99,49%) dengan output kinerja berupa tersusunnya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024.
 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Sosialisasi peraturan perundang-undangan belum dilaksanakan karena sesuai dengan rencana aksi tahun 2025 akan dilaksanakan di Triwulan III
 3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Dari anggaran Rp. 3.582.431.066,- Telah terealisasi Rp. 1.814.647.707 (50,65 %) untuk pembayaran gaji dan TPP PNS Kecamatan Karangmalang sejumlah 27 orang selama 6 bulan.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Dari anggaran Rp. 18.000.000,- telah terealisasi 10.967.000,- (60,93%) untuk penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 6 bulan.

- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dari anggaran Rp. 81.342.900,- telah terealisasi sebesar Rp. 62.054.900,- (76,23%) untuk penyediaan alat tulis kantor, kertas dan cover, dan bahan komputer selama 6 bulan serta pengadaan 3 unit AC split dan 3 unit printer dan 2 unit personal komputer.

- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Dari anggaran Rp. 54.487.000,- telah terealisasi Rp. 26.794.000,- (49,18%) untuk penyediaan bahan logistik kantor selama 6 bulan

- d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dari anggaran Rp. 10.996.000,- telah terealisasi Rp. 1.855.200,- (16,87 %) untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 6 bulan

- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dari anggaran Rp. 7.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- (0%) untuk biaya perjalanan dinas ke luar kota dalam kurun waktu 6 bulan.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Mebel

Dari anggaran Rp. 16.870.000,- sudah terealisasi Rp. 8.400.000,- (49,79%) untuk pengadaan 1 paket meja kursi tamu di ruang pejabat.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dari anggaran Rp. 2.400.000,- sudah terealisasi Rp. 588.160,- (24,51 %) untuk belanja BBM kurir surat selama 6 bulan.

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dari anggaran Rp. 106.380.000,- sudah terealisasi Rp. 32.682.888,- (30,72%) untuk penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik selama 6 bulan.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dari anggaran Rp. 30.346.000,- sudah terealisasi Rp. 22.882.000,- (75,40 %) untuk penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 6 bulan.

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dari anggaran Rp. 228.901.000,- sudah terealisasi Rp. 95.984.500,- (41,93 %) untuk penyediaan jasa pelayanan umum kantor selama 6 bulan.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Dari anggaran Rp. 88.800.000,- sudah terealisasi 28.400.469,- (31,98 %) untuk penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas, pajak kendaraan dinas dan perijinannya sebanyak 13 unit.

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Dari anggaran Rp. 70.000.000,- sudah terealisasi Rp. 69.843.400,- (99,77 %) untuk rehab sedang gedung kantor kecamatan karangmalang sebanyak 2 gedung.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Dari anggaran Rp. 10.000.000,- sudah terealisasi Rp. 9.960.800,- (99,61%) untuk pelaksanaan monitoring musrebang desa/kelurahan dan musrenbang kecamatan.

b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Dari anggaran Rp. 121.689.800,- sudah terealisasi Rp. 44.450.000,- (36,53 %) untuk pembayaran gaji dan tunjangan perangkat kelurahan non PNS selama 6 bulan.

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatanm.

Dari anggaran Rp. 659.400.000,- sudah terealisasi sejumlah Rp. 284.270.000,- (43,11%) untuk pembayaran honorarium ketua RT/RW di kelurahan dan iuran BPJS ketenagakerjaan selama 6 bulan.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Dari anggaran Rp. 21.500.000,- sudah terealisasi Rp. 5.928.000,- (27,57%) untuk peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan selama 6 bulan.

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Dari anggaran Rp. 2.300.351.000,- sudah terealisasi sebesar Rp. 1.631.191.573,- (70,91%) untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik kelurahan sejumlah 53 paket.

b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Dari anggaran Rp. 252.381.000,- sudah terealisasi sebesar Rp. 173.780.000,- (68,85%) untuk pemberdayaan masyarakat di kelurahan sejumlah 4 kelompok masyarakat.

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Dari anggaran Rp. 21.000.000,- sudah terealisasi Rp. 10.500.000,- (25 %) untuk pembayaran honorarium tim

pengendali keamanan lingkungan tingkat kecamatan selama 6 bulan.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Fasilitasi Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Dari anggaran Rp. 50.000.000,- belum teralisasi (0 %) dikarenakan kegiatan direncanakan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2025.

- b. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Dari anggaran Rp. 40.000.000,- belum terealisasi (0 %) dikarenakan kegiatan direncanakan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2025.

- c. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

Dari anggaran Rp. 100.000.000,- belum terealisasi (0%) dikarenakan ada kebijakan efisiensi anggaran.

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Dari anggaran Rp. 10.000.000,- belum terealisasi (0 %) dikarenakan kegiatan direncanakan dilaksanakan pada triwulan III dan Triwulan IV tahun 2025.

- b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Dari anggaran Rp. 8.000.000,- belum terealisasi (0 %) dikarenakan kegiatan direncanakan dilaksanakan pada triwulan III dan Triwulan IV tahun 2025.

2.2 Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karangmalang 2025

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi

pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama mengandung tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan dan capaian tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100%)
1.	Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik di Kecamatan				
1.1	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan publik di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5	-	
2.	Meningkatkan Kinerja Kecamatan				
2.1	Meningkatnya kinerja kecamatan	Predikat LKjIP	72 (BB)	-	

Sampai dengan akhir triwulan II, capaian indikator kinerja utama, yaitu indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan predikat SAKIP nilainya belum keluar dikarenakan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dan review oleh inspektorat masih berjalan dan belum selesai.

2.3 Permasalahan dan Penyelesaian dalam Pelaksanaan Renja 2025

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, permasalahan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan renja Kecamatan Karangmalang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2025, selain penyusunan Renja Tahun 2026, Kecamatan Karangmalang juga menyusun Rencana Strategis 2025–2029, di samping

kegiatan rutin lainnya. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya beban kerja dalam periode yang bersamaan, sehingga diperlukan alokasi waktu dan sumber daya secara optimal. Oleh karena itu, disusunlah jadwal pelaksanaan kegiatan untuk memastikan seluruh agenda dapat terlaksana secara efektif dan tepat waktu.

2. Tingginya intensitas kegiatan menuntut peningkatan kualitas koordinasi lintas bidang guna menjamin ketercapaian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
3. Rendahnya realisasi anggaran hingga Triwulan II Tahun 2025 bahkan terdapat program yang belum sama sekali melaksanakan realisasi anggaran. Oleh karena itu diperlukan percepatan administrasi, penyesuaian jadwal kegiatan, dan penguatan koordinasi internal

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGMALANG

TAHUN 2025

Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tidak hanya mengacu pada isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta keterkaitannya dengan target kinerja dalam Renstra, tetapi juga mempertimbangkan hasil telaah terhadap arah kebijakan nasional sebagai landasan dalam penyusunan perencanaan yang selaras dan terpadu

3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dikenal adanya program, kegiatan dan sub kegiatan. Terakhir diadakan perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri ini adalah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889, tanggal 27 Desember 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan, dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukut sesuai tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program, sementara sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub kegiatan akan memudahkan stakeholder untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan

kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Rencana program dan kegiatan prioritas Kecamatan Karangmalang Tahun 2025, berisi program dan kegiatan, untuk mencapai sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif), selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD). Dalam.

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Kecamatan Karangmalang mempunyai 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 7.904.196.366,- (tujuh milyar sembilan ratus empat juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).

Untuk meningkatkan kinerja yang lebih efektif, efisien dan optimal, maka dilaksanakan perubahan rencana kerja. Dalam perubahan rencana kerja tahun 2025, disesuaikan dengan kebutuhan riil untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Karangmalang dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara lebih rinci, program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan 2025 Kecamatan Karangmalang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Kecamatan Karangmalang Tahun 2025

No. Urut					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penetapan APBD 2025			Bertambah / Berkurang		Setelah Perubahan			Keterangan
							Target	Satuan	Anggaran (Rp.)	Pergeseran Terakhi APBD 2025 (Rp.)	Perubahan APBD 2025 (Rp.)	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					UNSUR KEWILAYAHAN										
					KECAMATAN										
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100	%	4.308.873.966	(2.500.000)	136.902.000	100	%	4.443.275.966	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	4	Dokumen	5.920.000	0	0	4	Dokumen	5.920.000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2.500.000	0	0	2	Dokumen	2.500.000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Dokumen	3.420.000	0	0	2	Dokumen	3.420.000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Tercukupinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	3.582.431.066	0	0	100	%	3.582.431.066	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	Orang	3.582.431.066	0	0	28	Orang	3.582.431.066	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Tercukupinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	5.000.000	0	0	100	%	5.000.000	
7	01	01	2.01	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	28	Orang	5.000.000	0	0	28	Orang	5.000.000	

No. Urut					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penetapan APBD 2025			Bertambah / Berkurang		Setelah Perubahan			Keterangan
							Target	Satuan	Anggaran (Rp.)	Pergeseran Terakhi APBD 2025 (Rp.)	Perubahan APBD 2025 (Rp.)	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tercukupinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	171.825.900	(2.500.000)	63.671.000	100	%	232.996.900	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Paket	18.000.000	0	0	12	Paket	18.000.000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Paket	81.342.900	0	64.351.000	12	Paket	145.693.900	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	12	Paket	54.487.000	0	2.820.000	12	Paket	57.307.000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	12	Paket	10.996.000	0	0	12	Paket	10.996.000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	7.000.000	(2.500.000)	(3.500.000)	12	Laporan	1.000.000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	16.870.000	0	(8.435.000)	100	%	8.435.000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Paket	16.870.000	0	(8.435.000)	1	unit	8.435.000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	368.027.000	0	31.666.000	100	%	399.693.000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2.400.000	0	0	12	Laporan	2.400.000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	106.380.000	0	18.600.000	12	Laporan	124.980.000	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Laporan	30.346.000	0	13.066.000	12	Laporan	43.412.000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	228.901.000	0	0	12	Laporan	228.901.000	

No. Urut					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penetapan APBD 2025			Bertambah / Berkurang		Setelah Perubahan			Keterangan
							Target	Satuan	Anggaran (Rp.)	Pergeseran Terakhi APBD 2025 (Rp.)	Perubahan APBD 2025 (Rp.)	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	158.800.000	0	50.000.000	100	%	208.800.000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31	Unit	88.800.000	0	0	31	Unit	88.800.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	Gedung	70.000.000	0	50.000.000	2	Gedung	120.000.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan yang Sesuai Standar Pelayanan	100	%	791.089.800	0	33.028.000	100	%	824.117.800	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terkoordinir dengan Baik	100	%	131.689.800	0	10.180.000	100	%	141.869.800	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11	Laporan	10.000.000	0	0	11	Laporan	10.000.000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Laporan	121.689.800	0	10.180.000	12	Laporan	131.869.800	

No. Urut					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penetapan APBD 2025			Bertambah / Berkurang		Setelah Perubahan			Keterangan
							Target	Satuan	Anggaran (Rp.)	Pergeseran Terakhi APBD 2025 (Rp.)	Perubahan APBD 2025 (Rp.)	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada <i>di Kecamatan</i>	100	%	659.400.000	0	22.848.000	100	%	682.248.000	
7	01	02	2.02	02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	659.400.000	0	22.848.000	12	Laporan	682.248.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	2.574.232.600	0	135.000.000	100	%	2.709.232.600	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Desa	100	%	21.500.000	0	0	100	%	21.500.000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	21.500.000	0	0	12	Laporan	21.500.000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan	100	%	2.552.732.600	0	135.000.000	100	%	2.687.732.600	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	40	Paket	2.300.351.000	0	128.890.000		Paket	2.429.241.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas	252.381.600	0	6.110.000		Pokmas	258.491.600	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penanganan Laporan Kejadian	100	%	22.000.000	0	0	100	%	22.000.000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	22.000.000	0	0	100	%	22.000.000	

No. Urut					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penetapan APBD 2025			Bertambah / Berkurang		Setelah Perubahan			Keterangan
							Target	Satuan	Anggaran (Rp.)	Pergeseran Terakhi APBD 2025 (Rp.)	Perubahan APBD 2025 (Rp.)	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	22.000.000	0	0	12	Laporan	22.000.000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Terkoordinir dengan Baik	100	%	190.000.000	(100.000.000)	0	100	%	90.000.000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terselenggara dengan Baik	100	%	190.000.000	(100.000.000)	0	100	%	90.000.000	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50	Orang	50.000.000	0	0	50	Orang	50.000.000	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	75	Orang	40.000.000	0	0	75	Orang	40.000.000	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500	Orang	100.000.000	(100.000.000)	0	0	Orang	0	

No. Urut					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penetapan APBD 2025			Bertambah / Berkurang		Setelah Perubahan			Keterangan
							Target	Satuan	Anggaran (Rp.)	Pergeseran Terakhi APBD 2025 (Rp.)	Perubahan APBD 2025 (Rp.)	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Prosentase Jumlah Desa yang menyelesaikan RKP Desa dan APB Desa tepat Waktu	100	%	18.000.000	0	0	100	%	18.000.000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Prosentase Jumlah Desa yang Mendapatkan Fasilitas, Rekomendasi dan Pembinaan	100	%	18.000.000	0	0	100	%	18.000.000	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3	Dokumen	10.000.000	0	0	3	Dokumen	10.000.000	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset DEsa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2	Dokumen	8.000.000	0	0	2	Dokumen	8.000.000	
Jumlah									7.904.196.366	(102.500.000)	304.930.000			8.106.626.366	

Dari tabel di atas dapat diketahui, pada perubahan rencana kerja tahun 2025 Kecamatan Karangmalang ada 4 (empat) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan yang mengalami perubahan, baik yang mengalami penambahan pagu maupun yang mengalami penurunan pagu anggaran, dengan total penambahan anggaran sebesar Rp. 304.930.000,- sehingga anggaran Kecamatan Karangmalang setelah mengalami perubahan menjadi Rp. 8.106.626.366,-

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan berikut penjelasannya antara lain :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran semula Rp. 4.308.873.966,- kemudian pada perubahan anggaran bertambah sebesar Rp. 134.402.000,- sehingga menjadi Rp. 4.443.275.966,- Perubahan pada :

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

(1). Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Anggaran semula Rp. 81.342.900,- bertambah sebesar Rp. 64.351.000,- untuk mengakomodir pengadaan 2 unit AC floor standing dan 1 unit personal komputer sehingga setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 145.693.900,-

(2). Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

Anggaran semula Rp. 54.487.000,- bertambah sebesar Rp. 2.820.000,- untuk mengakomodir minuman harian berupa air mineral untuk masyarakat pemohon pelayanan sehingga setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 57.307.000,-

(3). Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Anggaran semula Rp. 7.000.000,- berkurang karena efisiensi sebesar Rp. 6.000.000,- sehingga setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 1.000.000,-

2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

(1). Sub kegiatan pengadaan mebel

Anggaran semula Rp. 16.870.000,- berkurang sebesar Rp. 8.435.000,- dikarenakan ada pengurangan jumlah unit

pengadaan mebel yang semula direncanakan untuk pembelian 2 (dua) unit diefisienkan menjadi 1 (satu) unit sehingga setelah perubahan menjadi Rp. 8.435.000,-

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

(1). Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Anggaran semula Rp. 106.380.000,- bertambah sebesar Rp. 18.600.000,- untuk penambahan daya di gedung baru kantor kelurahan Kroyo, sehingga setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 124.980.000,-

(2). Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Anggaran semula Rp. 30.346.000,- bertambah sebesar Rp. 13.066.000,- untuk pemeliharaan AC, komputer, laptop dan printer, sehingga setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 43.412.000,-

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

(1). Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Anggaran semula Rp. 70.000.000,- bertambah sebesar Rp. 50.000.000,- untuk pemeliharaan gedung untuk sekretariat PPK dan Panwascam, sehingga setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 120.000.000,-

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Anggaran semula Rp. 791.089.800,- bertambah sebesar Rp. 33.028.000,- sehingga menjadi Rp. 824.117.800,- Perubahan terjadi pada :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

(1). Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Anggaran semula Rp. 121.689.800,- bertambah sebesar Rp. 10.180.000,- untuk mengakomodir biaya jasa pengabdian 1

- (satu) orang perangkat kelurahan yang pensiun sehingga setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 131.869.800,-
2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - (1). Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Anggaran semula Rp. 659.400.000,- bertambah sebesar Rp. 22.848.000,- untuk mengakomodir iuran BPJS Ketenagakerjaan Ketua RT/RW di Kelurahan, sehingga setelah perubahan menjadi Rp. 682.248.000,-
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Anggaran semula Rp. 2.552.732.600,- bertambah sebesar Rp. 135.000.000,- sehingga menjadi Rp. 2.687.732.600,- Perubahan pada :
1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - (1). Sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
Anggaran semula Rp. 2.300.351.000,- bertambah sebesar Rp. 128.890.000,- untuk pembangunan talud, drainase dan perbaikan di beberapa ruas jalan kelurahan, sehingga setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 2.429.241.000,-
 - (2). Pemberdayaan masyarakat di kelurahan
Anggaran semula Rp. 252.381.600,- bertambah sejumlah Rp. 6.110.000,- untuk mengakomodir verifikasi dan validasi data pensasaran kemiskinan di kelurahan sehingga anggaran menjadi Rp. 258.491.600,-
- D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Anggaran semula Rp. 190.000.000,- berkurang sebesar Rp. 100.000.000,- sehingga menjadi Rp. 90.000.000,- Perubahan terjadi pada :
1. Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
 - (1). Sub kegiatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna

mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.

Anggaran semula Rp. 100.000.000,- mengalami pengurangan karena kebijakan efisiensi sebesar Rp. 100.000.000,- sehingga setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 0,-.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karangmalang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang diatur dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 berlandaskan prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja pemerintah, sebagaimana tertuang dalam RPJPD dan RPJMD. Perubahan rencana kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Perubahan rencana kerja ini akan dijadikan pedoman/acuan bagi Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan/sub kegiatan Kecamatan Karangmalang Tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karangmalang Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh personil Kecamatan Karangmalang.

Dengan perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karangmalang Tahun 2025 ini diharapkan pelaksanaan seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik, dalam ikut serta mewujudkan tercapainya Bumi Sukowati yang sejahtera dan berbudaya berlandaskan semangat gotong-royong.

Karangmalang, 24 Juli 2025

CAMAT KARANGMALANG



DANI WANYU SETIAWAN, S.STP, MH
NIP. 19800131 199912 1 001